**MODEL PENGEMBANGAN *ISLAMIC SOCIAL ENTERPRISE* DI INDONESIA**

**1Regina Putri Listyadewi, 2Sumardi, 3Zaima Latifah, 4Hasse Jubba**

1Magister Agama dan Lintas Budaya, Ekonomi Islam, Sekolah Pascasarjana, Universitas Gadjah Mada, [reginaputrilistyadewi@mail.ugm.ac.id](mailto:reginaputrilistyadewi@mail.ugm.ac.id)

2Magister Agama dan Lintas Budaya, Ekonomi Islam, Sekolah Pascasarjana, Universitas Gadjah Mada, [sumardi1996@mail.ugm.ac.id](mailto:sumardi1996@mail.ugm.ac.id)

3Magister Agama dan Lintas Budaya, Ekonomi Islam, Sekolah Pascasarjana, Universitas Gadjah Mada, [zaimalatifah@mail.ugm.ac.id](mailto:zaimalatifah@mail.ugm.ac.id)

4 Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, Indonesia, [hasse@umy.ac.id](mailto:hasse@umy.ac.id)

# ABSTRACT

The main social problem in developing countries is poverty because inadequate development so that there are still low-income groups who cannot fulfill their basic needs. Islamic Social Enterprise (ISE) is a community-centred mode of business initiative to solve the problems of economic inequality, concentration of wealth, and social divisions. This study aims to examine the practice of ISE in Indonesia and the alternative development models based on the challenges and opportunities faced as a future strategy. The data analysis method used is literature study. This research produces an ISE development model from philanthropic institutions that have capital from donors to be used in a business with a profit sharing model as well as training and capital assistance to comply with sharia principles. The purpose of profit sharing is to expand the range of benefits from ISE thus it can develop and be sustainable in Indonesia.

*Keywords: Social problem, Development model, Islamic social enterprise*

# ABSTRAK

Permasalahan sosial utama di negara berkembang adalah kemiskinan yang disebabkan pembangunan tidak memadai sehingga masih terdapat golongan *low-income* yang tidak dapat memenuhi kebutuhan dasar hidup mereka. *Islamic Social Enterprise (ISE)* adalah mode bisnis yang berpusat pada masyarakat dan strategi alami untuk memecahkan masalah ketimpangan ekonomi, konsentrasi kekayaan, dan perpecahan sosial. Penelitian ini bertujuan mengkaji praktik ISE yang ada di Indonesia serta melihat alternatif model pengembangan berdasarkan tantangan dan peluang yang dihadapi sebagai strategi ke depannya. Metode analisa data yang digunakan adalah studi literatur dengan cara mengkaji berbagai sumber data sekunder terkait topik penelitian. Penelitian ini menghasilkan model pengembangan ISE dari sisi lembaga filantropi yang memiliki modal dari para donatur untuk dimanfaatkan dalam bisnis dengan model bagi hasil serta pelatihan dan pendampingan modal agar sesuai dengan prinsip syariah. Tujuan dari bagi hasil ini ialah untuk memperluas jangkauan manfaat sehingga ISE dapat berkembang dan berkelanjutan di Indonesia.

**Kata Kunci: Permasalahan sosial, Model pengembangan, Islamic social enterprise**

# PENDAHULUAN

Kemiskinan merupakan masalah sosial utama yang terjadi di Negara berkembang termasuk Indonesia. Hal ini disebabkan karena kurangnya kesempatan kerja dan pembangunan yang tidak memadai sehingga masih terdapat golongan *low-income* yang tidak dapat memenuhi kebutuhan dasar hidup mereka. Proporsi penduduk dalam kemiskinan ekstrem mengalami penurunan yang cukup berarti dalam kurun waktu tahun 2015 – 2019, namun kembali mengalami peningkatan pada tahun 2020 yang disebabkan adanya pandemi Covid-19, yaitu sekitar 3 sampai 4 orang dari 100 penduduk Indonesia hidup dalam kemiskinan ekstrem.[[1]](#footnote-1) Penanganan masalah sosial tidak cukup hanya dengan pendekatan satu dimensi, melainkan perlu ditangani secara sistemis dan melibatkan berbagai level agar dapat mendukung upaya preventif dan pengembangan. Partisipasi dan tanggung jawab masyarakat perlu dibangun agar masyarakat dapat lebih kreatif, mandiri, kritis, dan resistan terhadap faktor munculnya masalah sosial sehingga masyarakat sebagai sebuah sistem dapat menciptakan tatanan kehidupan yang lebih baik.[[2]](#footnote-2) Pengembangan ekosistem social enterprise yang mengedepankan inovasi dan kolaborasi merupakan salah satu solusi yang dibutuhkan dalam mengatasi masalah-masalah sosial yang terjadi di tengah masyarakat Islam di Indonesia.[[3]](#footnote-3)

Kajian tentang pengembangan masyarakat Islam di Indonesia melalui pendekatan *social entrepreneurship* dan *celestial entrepreneurship* pernah dilakukan. Fenomena dalam penelitian yaitu menitikberatkan Indonesia sebagai negara mayoritas muslim dan kondisi pandemi Covid-19 yang semakin menciptakan lapisan masyarakat miskin baru. Hasil penelitian menunjukkan bahwa mengembangkan ekosistem kewirausahaan sosial yang mengedepankan inovasi dan kolaborasi merupakan salah satu solusi yang dibutuhkan mengatasi masalah-masalah sosial yang terjadi di tengah masyarakat Islam di Indonesia. Praktik wirausaha yang dijalankan masyarakat Islam menjadi bagian dari tanggung jawab sosial, di mana keseluruhan praktiknya harus dibingkai oleh nilai-nilai Islam yang lebih mengedepankan dimensi sosial kemanusiaan daripada semata-mata berorientasi pada keuntungan personal yang bersifat finansial.[[4]](#footnote-4)

Filosofi *social enterprise* memiliki kesamaan dengan konsep dalam Islam yaitu pemberdayaan manusia untuk meningkatkan kesejahteraan melalui bantuan dari zakat, infaq, shodaqoh.[[5]](#footnote-5) *Islamic Social Enterprise (ISE)* di negara-negara mayoritas Muslim akan meningkatkan kreativitas dan produktivitas populasi terutama bagi penduduk miskin. Kegiatan ini akan sangat membantu dalam mengurangi kemiskinan dan meningkatkan inklusi keuangan melalui emansipasi sosial dan ekonomi dalam bingkai syariah Islam.[[6]](#footnote-6)

Jumlah pemeluk Islam di Indonesia sekitar 87% dari populasi menunjukkan bahwa terdapat potensi yang besar dalam mengembangkan sektor ekonomi dan keuangan syariah. Berdasarkan data LEKSI pada tahun 2020 posisi Indonesia naik ke peringkat 4 dari peringkat 5 dunia dalam pengembangan ekonomi syariah, dengan aset keuangan syariah di Indonesia menempati peringkat 7 dunia dengan total aset sebesar US$99 miliar. Salah satu bentuk dukungan pemerintah untuk mempercepat pengembangan ini yaitu dengan diterbitkannya PP No 2 Tahun 2022 tentang Pengembangan Kewirausahaan Nasional Tahun 2021 – 2024. Hal ini menunjukkan potensi dan kesempatan yang sangat besar dapat dimanfaatkan oleh penggerak *socialpreneurship* dalam negeri.

Penelitian tentang *Islamic Social Enterprise*, baik di dalam maupun luar negeri, masih relatif sedikit jika dibandingkan dengan *social enterprise* secara konvensional karena tema ini tergolong kajian akademik yang baru. Hal ini berimplikasi bahwa kajian ini perlu mendapatkan perhatian khusus karena ekonomi syariah dikenal sebagai ekonomi rabbani dan insani yang bertujuan untuk memajukan kesejahteraan masyarakat sehingga diharapkan dapat mengatasi masalah sosial yang terkandung didalamnya.[[7]](#footnote-7)

Berdasarkan latar belakang dan penelitian yang telah ada sebelumnya, maka penelitian ini akan mengkaji beberapa hal yakni bagaimana praktik, peluang, serta tantangan *Islamic Social Enterprise (ISE)* yang ada di Indonesia serta melihat alternatif model pengembangan yang dapat dilakukan berdasarkan analisa peluang dan tantangan yang ada.

**Penelitian Relevan**

Penelitian yang dilakukan oleh Sarif pada tahun 2013 merumuskan model *Islamic social entrepreneurship* berdasarkan paradigma tauhid *(tawhidic paradigm)* yang berarti bahwa penyerahan sejati kepada Allah dan pengabdian mutlak terhadap perintah-perintah Nya. Menurut para ahli hukum Islam, terdapat 5 (lima) kepentingan (daruri) yang diperlukan dan dipenuhi yaitu *deen* (agama), *nafs* (kehidupan atau diri), *nasl* (keluarga atau keturunan), *mal* (harta), dan *aql* (kecerdasan). Islam mendorong seseorang untuk terlibat dalam kewirausahaan dengan sumber pendanaan internal dan eksternal. Jenis kewirausahaan ini akan menciptakan nilai dan pembangunan sosial untuk mencapai keberlanjutan dan kesuksesan kehidupan duniawai maupun kehidupan setelahnya.[[8]](#footnote-8)

Pengukuran *Islamic Social Enterprise* dapat dilihat dari dimensi *Islamic accountability* melalui aspek “*accountability for what”* yang terdiri dari *accountability for input, accountability for output, accountability for procedural*, dengan mempertimbangkan sisi sosial dan ekonomi dalam organisasi Islam. Penelitian Muhammad Iqmal Hisham Kamaruddin & Sofiah Md Auzair tentang *Conceptualizing Islamic Social Enterprise (ISE) from Islamic Perspective* ini menunjukkan bahwa dari sisi input, pemangku kepentingan ISE masih berfokus dengan kegiatan sosial tradisional seperti penggalangan dana dan menggunakan sukarelawan. Dari sisi *output*, pemangku kepentingan ISE lebih percaya dengan kegiatan sosial dibandingkan menjalankan kegiatan ekonomi karena masih kurangnya variasi dan kuantitas barang ataupun jasa yang dihasilkan. Mayoritas pemangku kepentingan ISE fokus terhadap procedural untuk menjamin etika diterapkan dalam operasional ISE. Masalah yang sering muncul terkait ini adanya laporan manipulasi penyalahgunaan penggunaan dana publik, keterlibatan dalam pendanaan terorisme, serta penggelapan dana yang dilakukan oleh top management.[[9]](#footnote-9)

Dalam penelitian Aminu Sikiru Olanrewaju pada tahun 2020 mengkaji kerangka interpolasi empat faktor produksi (*capital, land, labour,* dan *entrepreneurship*) yang dapat dieksplorasi dalam merangsang Islamic Social Enterprise di masyarakat Muslim melalui *Islamic Social Finance (ISF).* Hasilnya bahwa perusahaan sosial memperoleh keuntungan, Baitul-zakat memiliki bagian keuntungan, masyarakat Muslim dapat memiliki tenaga kerja yang lebih baik, terciptanya nilai tambah sosial dan perusahaan ini juga membayar zakat perusahaan untuk meningkatkan pengumpulan zakat dan mengurangi pengangguran**.[[10]](#footnote-10)**

1. ***Social Enterprise* (Usaha Sosial)**

Konsep *social entrepreneurship* berbeda dengan *business entrepreneurship*, meskipun *business entrepreneurship* memiliki tujuan untuk mendorong kegiatan kewirausahaan akan tetapi memiliki semangat untuk mengejar keuntungan ataupun memperkaya diri sendiri. Di sisi lain, social entrepreneurship apabila memiliki keuntungan dari aktivitas ekonomi maka kekayaan tersebut untuk menolong masyarakat maupun komunitas yang diberdayakan.[[11]](#footnote-11) The Boston Consulting Group mendefinisikan *social enterprise* sebagai perusahaan yang menjadikan dampak sosial sebagai tujuan utamanya dan menggunakan model bisnis untuk mencapai tujuannya, menyeimbangkan target profitabilitas dan dampak sosial, serta menginvestasikan kembali keuntungan dalam model bisnis tersebut.

*Social entrepreneurship* juga berbeda dengan konsep *CSR (Corporate Social Responsibility),* dimana perusahaan ketika melaksanakan program CSR biasanya bertujuan untuk lebih mengenalkan perusahaan tersebut terhadap masyarakat atau bisa dikatakan bahwa aktivitas yang dilakukan perusahaan bertujuan pada iklan atau branding perusahaan. Sedangkan social entrepreneurship merupakan sebuah konsep yang murni bergerak di bidang sosial dan digagas oleh masyarakat sendiri. Jika usaha biasa mengukur keberhasilan dari kinerja keuangannya (keuntungan ataupun pendapatan) maka social entrepreneurship mengukur keberhasilannya dari manfaat yang dirasakan masyarakat.[[12]](#footnote-12)

Social entrepreneurship menjadi salah satu alternatif penyelesaian masalah sosial seperti penggangguran, ekonomi, pendidikan, gender, kesehatan, serta lingkungan hidup. Menurut Taftazani terdapat dua tipe social entrepreneurship, pertama, mereka yang tidak memiliki latar belakang profesi pelayanan kemanusiaan tetapi mampu mengelola dan menggerakkan berbagai sumber daya manusianya; kedua, para professional di bidang pelayanan kemanusiaan yang sekaligus juga berperan sebagai social entrepreneur.[[13]](#footnote-13) Kegiatan sosial ini dilakukan dengan memberdayakan kelompok minoritas *(low income and disadvantaged groups)* dengan memberikan aksesibilitas ke fasilitas untuk sarana hidup yang berkelanjutan, sehingga dapat menciptakan tenaga kerja yang inklusif.[[14]](#footnote-14)

Laporan dari British Council & UNESCAP tahun 2018 mencatat terdapat 329.689 social enterprises berupa UMKM yang terdiri dari 20 nasional NGO, 753 lokal NGO, dan 11.563 co-operatives di Indonesia. Secara umum, klasifikasi model bisnis dari social enterprise business antara lain, profit-purpose tension, profit-purpose alignment, dan the philanthropic business termasuk donor-supported categories.

Hasil penelitian Kusumasari merumuskan bahwa di Indonesia terdapat 4 (empat) kategori model bisnis organisasi yang bergerak untuk memecahkan masalah sosial, ekonomi dan lingkungan di Indonesia yaitu model bisnis campuran, model bisnis syariah, model bisnis sukarela, dan model bisnis koperasi. Penelitian terhadap 30 (tiga puluh) organisasi di Pulau Jawa dan Bali tersebut dititikberatkan pada 3 (tiga) aspek meliputi, (1) preposisi nilai yaitu organisasi mengenal baik pelanggannya dengan mengetahui masalah sosial yang ingin diatasi sehingga produk dan jasa yang ditawarkan sesuai kebutuhan mereka; (2) penciptaan nilai yaitu merumuskan tujuan sehingga kegiatan yang dilakukan dapat mendukung visi dan misi organisasi, (3) tangkapan nilai sebagai metode organisasi dalam memperoleh profit dan mengukur kinerja serta pencapaian hasil. [[15]](#footnote-15)

Terdapat 6 (enam) aspek yang dibutuhkan dalam keberlanjutan social enterprise meliputi [[16]](#footnote-16): *Impact viability* Tujuan sosial dalam *social enterprise* dapat lebih luas dampaknya jika dapat membantu memberdayakan masyarakat dan secara bersamaan akan mengembangkan pembangunan bisnis dalam kewirausahaan sosial yang dijalankan.

1. *Operational viability*

Analisa kelayakan operasional dibutuhkan untuk memastikan kegiatan yang dijalankan dapat menjamin biaya operasional yang telah ditetapkan.

1. *Operational sustainability*

Keberlanjutan operasional dibutuhkan untuk mengetahui poin penting dalam mengetahui tolak ukur keberlanjutan kewirausahaan sosial.

1. *Financial sustainability*

Aspek keuangan dibutuhkan untuk mengetahui surplus yang dihasilkan sehingga dapat digunakan dalam pemenuhan kebutuhan perkembangan secara berkelanjutan.

1. *Balance sheet sustainability*

Aspek ini dibutuhkan untuk mengatasi transformasi perubahan dan mengetahui cara untuk membangun aset bisnis dari waktu ke waktu.

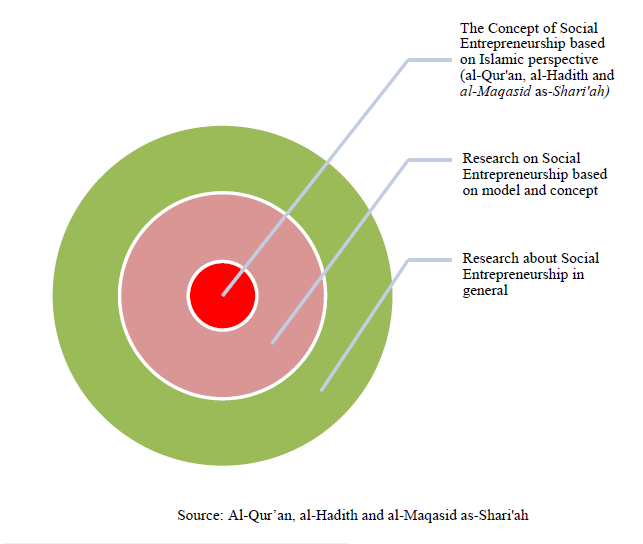
1. *Impact sustainability*

Hal-hal yang menjadi perhatian dalam tujuan sosial diatasi melalui dampak sosial yang secara konsisten dari waktu ke waktu serta mengukur dan menganalisa sejauh mana dampak sosial bermanfaat bagi masyarakat yang terlibat.

1. **Konsep *Islamic Social Enterprise* (Usaha Sosial Syariah)**

Konsep *social entrepreneurship* berdasarkan perspektif Islam dapat digambarkan melalui grafik berikut [[17]](#footnote-17) :

Gambar 1. Konsep *social entrepreneurship* berdasarkan perspektif Islam



*Sumber: Mohd Adib Abd Muin, Shuhairimi Abdullah, and Azizan Bahari (2015)*

Dari gambar diatas maka konsep *Islamic Social Entrepreneurship* harus berdasarkan al-Qur’an, al-Hadith, serta menggunakan al-Maqasid as-Shari’ah dalam praktiknya untuk mencapai al-Falah. Selain itu, dibutuhkan aspek pendukung lainnya meliputi: (1) konsep Islam yaitu Tawhid (Rukun iman, Rukun Islam, dan Ihsan); (2) konsep tolong menolong dalam memecahkan permasalahan sosial yaitu keadilan dan kesejahteraan; (3) konsep pendistribusian kekayaan yaitu Zakat dan Wakaf.

ISE adalah mode inisiatif bisnis yang berpusat pada masyarakat dan strategi alami untuk memecahkan masalah ketimpangan ekonomi, konsentrasi kekayaan, dan perpecahan sosial. ISE tidak terlepas dari ajaran Islam dalam pelaksanaan operasi dan kegiatannya. Berdasarkan kriteria ISE tersebut, maka konsep ISE merupakan penggabungan tujuan SE dan ajaran serta nilai dalam Islam yang terdiri dari tujuan islami sosial, tujuan islami ekonomi, serta prinsip dan nilai Islam. Dalam hal menjamin ketiga aspek tersebut dapat diaplikasikan oleh ISE, maka dibutuhkan peran penting jajaran direksi dan manajemen sebagai menjadi orang yang bertanggung jawab atas semua keputusan dan kegiatan yang dilakukan oleh ISE. [[18]](#footnote-18)

ISE berperan pada masyarakat dalam beberapa bentuk, seperti mengakomodasi donatur untuk memberikan sumbangan dan menawarkan barang serta jasa yang terjangkau kepada kelompok masyarakat tertentu, termasuk melayani masyarakat setempat dengan menciptakan kesempatan kerja. Pegawai ISE dapat diberikan gaji sebagai staf maupun sukaralewan dengan tingkat gaji yang lebih rendah. Selain itu, kontribusi berupa dampak sosial dari lembaga nirlaba dipandang sebagai perbuatan baik bagi muslim dalam rangka meningkatkan standar hidup dan menjadi manusia yang lebih taat. Pengumpulan dana amal oleh ISE dapat digunakan untuk berinvestasi kembali di masa depan. Tindakan ini dilakukan dalam berbagai kegiatan bisnis seperti perdagangan. Melalui pola seperti ini menjadikan ISE dapat berkontribusi dalam memberikan dampak sosial bagi masyarakat terutama bagi kelompok muslim yang kurang beruntung. [[19]](#footnote-19)

Instrumen dalam *Islamic Social Finance (ISF)* berupa Zakat, Sodaqoh, dan Wakaf merupakan sistem tradisional Islam yang dapat menjadi struktur ekonomi sosial tangguh dengan mendistribusikan kembali kekayaan untuk mengurangi kemiskinan di masyarakat. Kegiatan tersebut dikelola oleh lembaga-lembaga keuangan sosial Islam yang berjalan secara independent sehingga membatasi kekuatan mereka untuk memperluas ruang lingkup secara kompetitif, mengembangkan prototipe yang dapat disesuaikan, dan keberlangsungan *Islamic Social Enterprise*.[[20]](#footnote-20)

Mudharabah *linked* wakaf atau pembiayaan dengan akad mudharabah, merupakan bentuk inovasi dan integrasi pembiayaan UMKM dengan komposisi sumber dana yang berasal dari dana komersial dan dana wakaf uang yang dikelola Koperasi Syariah Berkah Bersama (KSBB) melalui kolaborasi dengan Komunitas Pengusaha Muslim Indonesia (KPMI) Surabaya. Dana akan disalurkan pada proyek rendah risiko milik UMKM yang direkomendasikan oleh KPMI Surabaya dengan durasi proyek kurang dari enam bulan. Keuntungan pengelolaan wakaf uang akan disalurkan dalam aktivitas sosial, pendidikan, dan ekonomi serta dakwah berupa pembinaan bisnis dan fiqh muamalah berkelanjutan oleh KPMI Surabaya.[[21]](#footnote-21)

*Islamic Social Finance (ISF)* dikenal sebagai third sector economy yang muncul akibat kegagalan model ekonomi pasar suatu negara *(first or private* dan *second or public sector)* dalam memenuhi kesejahteraan masyarakat. Aktualisasi ekspansi third sector membutuhkan kewirausahaan yang tepat untuk mengarahkan ekonomi menuju pembangunan yang berorientasi keadilan sosial. Kewirausahaan Islam sangat cocok dengan model third sector economy melalui penerapan prinsip-prinsip Islam dapat mengembangkan dan menarik perusahaan besar yang saat ini berada di sektor utama dalam pertumbuhan ekonomi. [[22]](#footnote-22)

Pengelolaan *Islamic Social Finance (ISF)* yang baik dapat menjadi kontributor potensial yang sangat menguntungkan pendapatan nasional dan kesejahteraan ekonomi. Hal ini disebabkan ISF dapat menjadi sumber dana pembiayaan proyek kecil hingga besar seperti rumah sakit wakaf, pendidikan wakaf, dan kota pintar wakaf yang menjadikan wakaf sebagai bagian dari cara hidup bangsa (Fauziah, 2021). Penelitian tentang integrasi ISF dan social enterprise di Indonesia pernah dilakukan oleh (Fauziah, 2021) yang menghasilkan Integrated Cash Waqf Social Enterprise Business (ICWSE-B) Model yaitu social enterprise harus didaftarkan sebagai Nazeer terlebih dahulu jika ingin menggunakan sumber pendanaan dari wakaf. Selain itu, regulator setuju bahwa dana wakaf tunai juga harus dikelola dan dioptimalkan dalam platform investasi perjanjian syariah sehingga Nazeer harus memiliki pengetahuan investasi yang baik dan keterampilan untuk memaksimalkan investasi dana wakaf tunai serta meminimalkan risiko. Wakaf tunai juga dapat membiayai kegiatan bisnis maupun proyek investasi dari social enterprise selama memenuhi pilar wakaf, meliputi, Waqif (donor), Mauquf (asset/properti), Mauquf alaih (penerima manfaat), dan Sighah (ijab/akad).

# METODE

Metodologi dalam penelitian ini adalah metode kualitatif berdasarkan penjelasan dan deskriptif metode studi kasus yang digunakan dalam beberapa penelitian sebelumnya.

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan jenis data sekunder dan sumber data dari berbagai literatur baik buku, artikel, berita, dan sumber lainnya yang relevan dengan topik atau masalah yang menjadi objek penelitian. Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan adalah studi literatur atau studi pustaka yang dilakukan dengan cara mengkaji berbagai sumber data yang ditemukan berdasarkan keterkaitannya dengan tema mengkaji praktik Islamic social enterprise yang ada di Indonesia serta melihat potensi pengembangan berdasarkan tantangan dan peluang yang dihadapi sebagai strategi ke depannya. Teknik analisa yang digunakan adalah studi deskriptif untuk dapat menjawab rumusan masalah dalam penelitian ini.

**PEMBAHASAN**

# Praktik *Islamic Social Enterprise* Di Indonesia

Berdasarkan penelitian sebelumnya, terdapat beberapa praktik *Islamic Social Enterprise* di Indonesia yang telah diimplementasikan oleh lembaga dengan berbagai jenis usaha dan model bisnis dalam penelitian ini dikategorikan dalam dua hal yakni lembaga nonfilantropi dan lembaga filantropi :

1. Lembaga Nonfilantropi
2. ‘Aisyiyah, hadir dengan program Micro and Small Enterprises (MSEs). Penerapan dalam program ini melalui peningkatan Islamic leadership dan emotional intelligence mempengaruhi kinerja bisnis UMKM kelolaan organisasi sosial-agama (‘Aisyiyah) yaitu aspek sumber daya manusia, keuangan, produksi dan operasi, pemasaran, sosial, budaya, dan ekonomi.
3. Pemerintah Provinsi Jawa Barat melalui program *One Pesantren – One Product*. Inisiatif program yang dilakukan oleh Pesantren At-Taqwa dalam bidang teknologi yang menghasilkan berbagai aspek yaitu nilai sosial, inovasi, partisipasi masyarakat, ekonomi Setiap program pendampingan tetap menjalankan nilai kearifan lokal yang dimiliki pesantren, semangat memberantas rentenir / mafia riba, menyediakan inovasi kelembagaan dengan masyarakat, dan memberikan dampak positif bagi peningkatan pendapatan masyarak sekitar.
4. Tiara Handicraft, Surabaya, melakukan program ISE bagi penyandang disabilitas. Penerapan program ini berdasarkan karakteristik social entrepreneurship meliputi misi sosial, pemberdayaan, prinsip bisnis sesuai etika, investasi hasil untuk misi sosial, dan keberlanjutan.
5. Yayasan Unisma, melalui program pengembangan usaha unit berasal dari dana wakaf. Penetapan dana wakaf produktif dengan membangun tiga minimarket, dimana tujuannya bukan hanya untuk memenuhi kebutuhan tetapi juga memberikan lapangan pekerjaan. Yayasan UNISMA dalam mengembangkan usahanya menggunankan metode sesuai dengan teori George R Terry, antara lain: 1) Perencanaan, salah satunya yakni membentuk pengelola wakaf (Nadzir), 2) Pengorganisasian, dengan membentuk struktur pengelola dana dan bisnis, 3) Pelaksanaan, 4) Pengawasan, minimarket sendiri memiliki pengawasan internal dan eksternal. Alokasi manfaat dari hasil bisnis telah tepat sasaran dari semua minimarket, laba dialokasikan 60%-70% untuk pengembangan wakaf, 20%-30% mauquf ‘alaih dan 10% nadzir.
6. Pondok Pesantren Gontor melalui program unit bisnis La Tansa Kepontren dan melakukan manajemen sistem tanah wakaf. Yayasan Pemeliharaan dan Perluasan Wakaf Pondok Modern (YPPWPM) dibentuk untuk mengelola dan mengembangkan harta / aset wakaf Pondok Gontor. Gerakan ekonomi yang dilakukan berupa unit/kegiatan bisnis di sektor riil di bawah pembentukan Kopontren yang mengoperasikan 32 unit kegiatan ekonomi dengan total laba Rp 124 Miliar (USD 8,8 juta) per tahun yang telah menguntungkan pesantren, para santri, dan masyarakat sekitar. Lahan perkebunan dikelola oleh YPPWPM dengan menanam tanaman pangan dan sekunder dilakukan dengan cara : 1) Kerja sama akad Mukharabah di mana sawah dikelola oleh petani dan rasio bagi hasil ditentukan di awal kontrak (40 : 60), 2) Kerja sama akad Ijarah di mana tanah wakaf disewakan kepada petani dengan membayar sewa pada saat musim panen, 3) Bentuk sewa didasarkan pada hasil panen, yaitu orang akan membayar sesuai jumlah hasil yang diperoleh saja.
7. Lembaga Filantropi
8. Dompet Dhuafa, program *Social Entrepreneur Academy*. Lembaga Amal Zakat yang menggunakan social entrepreneurship dalam penyaluran dana ZIS (Zakat, Infaq, Shadaqah) sejak tahun 2013. Keunikan metode ini yaitu ilmu kewirausahaan digunakan dalam penyelesaian masalah sosial di masyarakat dan inisiator penyelesaian masalah yang ada di masyarakat adalah masyarakat itu sendiri ataupun sosial-sosial yang lain.
9. Lazismu Bengkulu & CV Presidium, *Islamic philanthropic movement*. Manejemen sistem ZISWAF dilakukan melalui 4 (empat) tahap meliputi one-way management system, the feedback management system, pilot project system, dan empowerment system. Sektor prioritas penyaluran adalah sektor pemberdayaan ekonomi dan pembangunan keagamaan bagi mustahiq. Hal ini sejalan dengan kebijakan penyaluran bantuan ZIS dan hasil pengelolaan wakaf produktif kepada mustahiq. Program ini juga meliputi pelatihan pemberdayaan zakat & wakaf produktif, baik bagi mustahiq, staf, maupun pengurus cabang.
10. Laznas BSM Umat dan Bank Syariah Indonesia (BSI), *Islamic Sociapreneur Development Program (ISDP)* . Program ini bertujuan untuk membentuk sociopreneur muda yang berkarakter Islami, professional, dan memiliki kepedulian sosial masyarakat. Berdasarkan Laporan Tahunan Lembaga di tahun 2019, program ini telah menyalurkan dana sebesar Rp 1,39 Miliar yang terdiri dari 5 (lima) kampus ISDP, 90 Mahasiswa penerima manfaat ISDP, 24 Mahasiswa telah mendapat modal, dengan 50 jumlah produk yang dihasilkan.

Dari temuan penelitian diatas menjelaskan tentang praktik *Islamic Social Enterprise (ISE)* yang pernah dilakukan di Indonesia. Tujuan dari seluruh lembaga dalam menjalankan ISE adalah untuk menangani permasalahan sosial yang ada di tengah masyarakat terutama yang berada di wilayah sekitar. Dari sisi lembaga yang menyelenggarakan, dapat dibedakan menjadi lembaga nonfilantropi dan lembaga filantropi.

Modal yang digunakan dalam menjalankan kegiatan bisnis ISE di lembaga nonfilantropi berasal dari donatur ataupun bagian dari keuntungan bisnis yang ada, sedangkan dalam lembaga filantropi, modal yang digunakan berasal dari aktivitas keagamaan seperti zakat dan wakaf sehingga pemilihan orang yang digunakan sebagai penerima modalpun harus sesuai ketetnuan syariat Islam.

# Analisis Tantangan Dan Peluang Islamic Social Enterprise Di Indonesia

Berdasarkan hasil kajian terhadap berbagai literatur dan penelitian sebelumnya, masih terdapat tantangan dalam praktik *Islamic Social Enterprise* di Indonesia agar dapat terus bertahan dan berkembang. Di sisi lain, terdapat juga peluang yang dapat dijadikan potensi pengembangan selanjutnya, dengan penjelasan sebagai berikut :

1. **Tantangan**

Hasil penelitian yang dilakukan oleh Fauziah, 2021 bahwa terdapat beberapa isu serta tantangan penerapan social enterprises di Indonesia, meliputi, tenaga kerja profesional yang masih kurang, kualitas kepemimpinan dari ketua proyek atau pemilik, dan isu yang paling utama terkait masalah keuangan sebagai modal bisnis model cash waqf. Konsep social enterprise dan Islamic social enterprise yang diperkenalkan di negara Asia jarang yang melibatkan kegiatan ekonomi dalam operasionalnya, melainkan hanya berfokus kepada kegiatan sosial saja. Hal ini mendorong kurangnya pengetahuan tentang manajemen keuangan dari lembaga nonprofit ini. [[23]](#footnote-23)

Dari sisi teknologi, Indonesia belum memiliki produk rancangan khusus yang dapat membantu memperbaiki kualitas social enterprise. Dalam hal ini, Indonesia dapat melihat ke beberapa Negara yang telah memiliki teknologi berkualitas dalam mendukung pendekatan terukur untuk memanfaatkan solusi terbaik social enterprise dari waktu ke waktu.[[24]](#footnote-24) Secara khusus untuk Islamic Social Enterprise, terdapat alat ukur yang efektif untuk membantu lembaga sosial maupun pengusaha dalam memberikan kesadaran, meningkatkan kegiatan sosial yang berdasarkan prinsip syariah, dan menghindari unsur terlarang seperti riba, gharar, dan maisir. [[25]](#footnote-25)

Pembiayaan menjadi tantangan yang terus menerus ada bagi social enterprise Indonesia. Berdasarkan studi yang dilakukan oleh Angel Investment Network Indonesia (ANGIN) di tahun 2016 ditemukan bahwa kurangnya modal menghambat social enterprise dalam upaya mereka menciptakan dampak bagi lingkungan dan sosial. Hasil lainnya dalam penelitian tersebut bahwa banyak investor tertarik berinvestasi pada social enterprise, namun social enterprise di Indonesia belum layak untuk diberikan investasi karena sejumlah faktor meliputi kualitas produk atau inovasi model bisnis, keterbatasan ukuran, traksi dan skala yang tidak memenuhi model bisnis, serta hasil kegiatan yang tidak terukur secara spesifik sehingga tidak dapat dibandingkan dengan potensi seperti investasi lainnya.[[26]](#footnote-26)

Dukungan pemerintah dalam bentuk bantuan pendanaan maupun regulasi dan ketentuan hukum tentang social enterprise masih kurang. Indonesia belum memiliki Undang – Undang yang mengatur tentang model bisnis social enterprise sehingga ada kompetisi antar organisasi untuk mendapatkan pendanaan publik. Tantangan ini juga disampaikan dalam penelitian British Council & UNESCAP pada tahun 2018, bahwa Indonesia belum memiliki peraturan khusus yang mengatur perusahaan sosial, badan hukum yang diperlukan, pajak, atau masalah spesifik lainnya. Namun, social enterprise di Indonesia terus bekerja sama dalam mencapai misi mereka untuk memperluas dampaknya terhadap masyarakat. Perlunya diciptakan ekosistem bisnis yang positif dan kolaboratif untuk mengembangkan social enterprise. [[27]](#footnote-27)

1. **Peluang**

Faktor yang paling mempengaruhi motif masyarakat untuk mendukung social enterprise adalah kredibilitas perusahaan. Di Indonesia, kredibilitas perusahaan memiliki peran yang lebih besar dalam meningkatkan dukungan masyarakat dibandingkan kredibilitas personal pemimpin ISE. Kesan masyarakat terhadap suatu merek juga mempengaruhi niat mereka untuk mendukung social enterprise, di mana hal tersebut tidak bisa ditingkatkan melalui iklan. Faktor tersebut berimplikasi bahwa komunikasi yang efektif merupakan kunci keberhasilan social enterprise dalam menghadapi tantangan menyediakan barang dan jasa yang saat ini tidak disediakan oleh bisnis konvensional, organisasi non-pemerintah atau badan pemerintahan. [[28]](#footnote-28) Berdasarkan Global Survey of Corporate Social yang dilakukan oleh Nielsen melaporkan bahwa Indonesia juga menghadirkan peluang khusus bagi *social enterpirse* yakni sebanyak 64% konsumen Indonesia bersedia membayar ekstra untuk merek yang berkomitmen membuat dampak positif bagi sosial dan lingkungan.

Sebagai salah satu instrumen *Islamic social finance*, wakaf tunai menciptakan dampak bagi kesejahteraan sosial ekonomi masyarakat, dengan menyediakan sumber dana bagi yang membutuhkan. Menurut Badan Wakaf Indonesia (BWI), potensi ekonomi dari wakaf di Indonesia mencapai Rp 180 triliun per tahun. Namun berdasarkan data yang terkumpul tentang wakaf tunai dari tahun 2011 hingga tahun 2018, hanya Rp 31,9 juta rupiah yang dihasilkan setiap tahun selama periode tersebut. Selanjutnya penelitian oleh Fauziah, 2021 menyebutkan bahwa terdapat peluang besar optimalisasi dana wakaf tunai untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi Indonesia.[[29]](#footnote-29) Oleh karena itu, wakaf tunai merupakan alat yang bermanfaat dalam memaksimalkan pemberian amal melalui cara yang efektif sehingga dapat mengarahkan masyarakat mencapai ekonomi yang lebih baik.[[30]](#footnote-30) Instrument ini menjamin bantuan keuangan yang tersedia secara terus menerus bagi setiap kelompok yang membutuhkan secara bergantian sehingga membuat masyarakat muslim lebih makmur dan inklusif.[[31]](#footnote-31)

Indonesia sebagai negara dengan mayoritas populasi muslim di dunia memiliki potensi wakaf tunai yang sangat besar, namun kesempatan ini masih belum menghasilkan output yang signifikan. Indonesia Waqf Deposits (IWD) sebagai institusi wakaf tunai di Indonesia berusaha mendapatkan hasil yang optimal dari potensi ini dan memaksimalkan kinerja mereka melalui pembentukan pengembangan wakaf tunai. [[32]](#footnote-32) Keberadaan wakaf tunai telah diakui di Indonesia dan diatur dalam UU No 41 tahun 2004. Selain itu, fatwa wakaf uang juga telah dikeluarkan oleh DSN MUI pada tahun 2012. Adanya peraturan tentang wakaf tunai ini dapat menjadi payung dan landasan yang mendukung pengembangan Islamic social enterprise melalui instrument *Islamic social finance* di Indonesia.

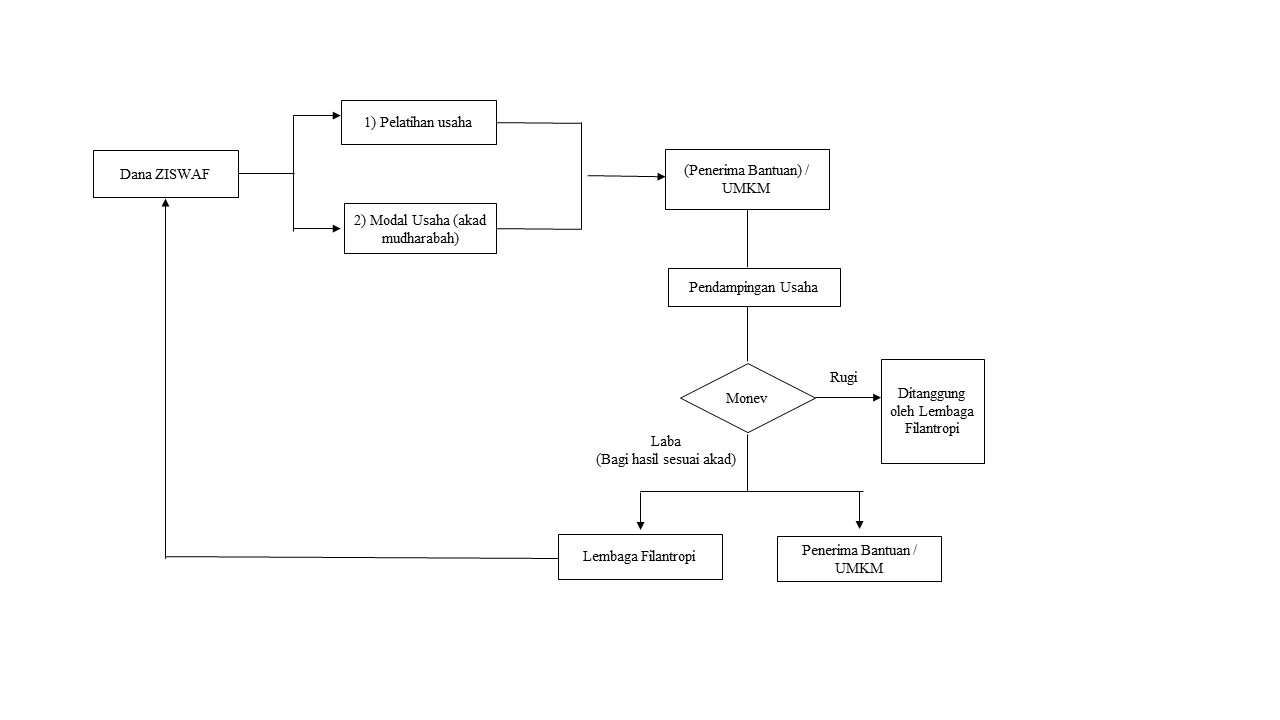
# Model Pengembangan *Islamic Social Enterprise (Ise)* Di Indonesia

Sebagai salah satu negara mayoritas muslim, potensi kehadiran dana zakat dan wakaf di Indonesia tidak dapat dihilangkan dalam pengembangan *Islamic social enterprise (ISE),* melalui lembaga filantropi, baik yang bernaung dibawah pemerintah melalui Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS), Badan Wakaf Indonesia (BWI), maupun lembaga yang dibuat oleh Yayasan seperti Lembaga Amil Zakat (LAZ), Dompet Dhuafa, Rumah Zakat dan lainnya memiliki peran dalam menjalankan *Islamic social enterprise (ISE).* Hadirnya lembaga filantropi di Indonesia dapat menjadi jembatan antara donator secara kolektif, dalam hal ini pemberi modal baik dana zakat maupun wakaf kepada para penerima manfaat atau para pengelola dana tentunya dengan model dan pengelolaan yang tepat agar tujuan dari ISE dapat tercapai.

ISE yang telah dilakukan sebelumnya hadir dengan berbagai bentuk mulai dari pengembangan kemampuan SDM (sumber daya manusia), pemberian modal usaha serta pembangunan unit bisnis. Model pendanaan dengan akad bagi hasil atau akad mudharabah telah dilakukan oleh BMT (Baitul Maal Wa Tamwil) salah satunya praktik yang dilakukan oleh BMT Amanah yaitu pendanaan dengan bagi hasil. Dari penelitian yang dilakukan sebelumnya bahwa tingkat profitabilitas BMT dari pembiayaan bagi hasil dan non bagi hasil lebih besar profitnya dari pembiayaan non bagi hasil atau murabahah. [[33]](#footnote-33)

Praktik mudharabah linked waqf atau pembiayaan dengan akad mudharabah merupakan bentuk inovasi dan integrasi pembiayaan UMKM dengan komposisi sumber dana yang berasal dari dana komersial dan dana wakaf uang yang dikelola Koperasi Syariah Berkah Bersama (KSBB) melalui kolaborasi dengan Komunitas Pengusaha Muslim Indonesia (KPMI) Surabaya. Dana akan disalurkan pada proyek rendah risiko milik UMKM yang direkomendasikan oleh KPMI Surabaya dengan durasi proyek kurang dari enam bulan. Keuntungan pengelolaan wakaf uang akan disalurkan dalam aktivitas sosial, pendidikan, dan ekonomi serta dakwah berupa pembinaan bisnis dan fiqh muamalah berkelanjutan oleh KPMI Surabaya. [[34]](#footnote-34)

BMT se-Kabupaten Demak melakukan 3 (tiga) sistem pengelolaan dalam mengelola dana ZISWAF. Pertama, sistem pengelolaan satu arah. yaitu dana masyarakat yang diterima didistribusikan secara serentak kepada masyarakat dengan skala prioritas mikro ekonomi. Kedua, sistem pengelolaan umpan balik (*feed back*) yaitu pengelola BMT sebagai fasilitator bagi masyarakat yang membutuhkan pendanaan, sehingga distribusi dana diupayakan sebagai modal pengembangan usaha menuju kemandirian. Ketiga, model pemberdayaan ekonomi dengan mudharabah muqayyadah (produk pembiayaan dengan para pengusaha yang amanah untuk mengelola dana dengan sistem bagi hasil guna memperbesar manfaat yang diterima oleh mustahik), dengan penyaluran wadi’ah muqayyadah (produk pemberdayaan para dhuafa oleh BMT dengan cara memberikan hewan ternak yang hasilnya dinikmati oleh peternak dhuafa), dan pemberdayaan dengan pinjaman lunak tanpa bagi hasil, khususnya bagi pedagang kecil.[[35]](#footnote-35)

Penelitian ini memberikan tawaran inovasi model baru secara sistemis dalam pengembangan bisnis berdasarkan tantangan dan peluang yang telah dijelaskan. Inovasi yang ditawarkan oleh penulis ialah mengkolaborasikan antara pengembangan SDM dan pemberi modal, dengan tahapan sebagai berikut :

Gambar 2. Inovasi Model Pengembangan *Islamic Social Enterprise* di Indonesia

*Sumber: Penulis, 2022*

Lembaga Filantropi sebagai pemberi modal yang diperoleh dari penghimpunan dana ZISWAF, baik dari individu maupun instansi. Dalam mengimplementasikan program ISE, sebelum memberikan modal atau pembiayaan, lembaga melakukan *assessment* (survei) terhadap calon penerima modal. Lembaga filantropi perlu memiliki KPI (Key Perfomance Indicator) agar pemberi modal dapat melakukan pemetaan usaha. Adapun tahapan dari penjelasan Gambar 1 di atas meliputi :

Pertama, pelatihan usaha dilakukan dan disesuaikan dengan kebutuhan para pelaksana usaha secara umum, baik yang telah memiliki usaha maupun baru merintis usaha. Salah satu bentuk pelatihan yang dilakukan seperti manajemen keuangan dan digital marketing. Perkembangan ekonomi digital di Indonesia mengalami perubahan seiring dengan perubahan perilaku masyarakat yakni 49,6% konsumen mencari informasi produk secara online sebelum melakukan pembelian. Permasalahan utama yang dihadapi UMKM menuju digitalisasi yaitu masih rendahnya sumber daya manusia dan akses teknologi yang belum mereta sehingga untuk menghadapi tantangan tersebut dibutuhkan pendampingan dan edukasi kepada pelaku bisnis yang menginginkan perubahan. Salah satu faktor penghambat dari digitalisasi ini bagi pelaku usaha ialah kompetensi SDM yang masih rendah terhadap pemahaman ekonomi digital. Pelatihan yang tidak berkelanjutan dan kurangnya sistem pengawasan dari hasil Latihan (Fuadi et al., 2021) Oleh sebab itu, dalam model ini dimasukkan pelatihan dan pendampingan bagi pelaku usaha atau penerima bantuan.

Kedua, setelah pelatihan dilanjutkan dengan pemberian modal dalam pemberian modal ini akad yang digunakan ialah akad mudharabah. Menurut Fatwa DSN MUI tahun 2000 bahwa pembiayaan mudharabah adalah pembiayaan yang disalurkan oleh lembaga keuangan Islam kepada pihak lain untuk suatu usaha yang produktif. Pembiayaan mudharabah merupakan akad kerja sama antara kedua pihak, yaitu pihak pertama menyediakan seluruh modal (shahibul maal) dan pihak kedua sebagai pengelola dana (mudharib), sedangkan keuntungan usaha dengan bagi hasil yang sesuai kesepakatan kontrak.

Ketiga, dilakukan monitoring terhadap usaha yang dilakukan baik per tiga bulan, enam bulan, atau satu tahun selanjutnya juga tetap ada pendampingan, baik dari hasil pelatihan seperti digitaslisasi dan pendaftaran usaha. Kemudian pada tahapan akhir ialah mengetahui apakah usaha tersebut mengalami keuntungan atau kerugian. Kerugian yang terjadi bukan karena kesalahan yang disengaja, tindakan yang melampui batas atau melanggar perjanjian menjadi tanggung jawab penerima bantuan atau pengelola dana usaha. Selain itu, laba bersih yang didapat dari bagi hasil dibagi untuk usaha tersebut dan lembaga zakat yang nantinya akan dijadikan program berkelanjutan dalam meluaskan ISE.

Perbedaan dari model ini dan beberapa model usaha yang dilakukan BMT berdasarkan data sebelumnya ialah adanya pendampingan dan pelatihan pada saat pemberian modal. Pendampingan usaha ini menjadi salah satu hal penting bagi lembaga dan pelaku usaha agar pelaku usaha yang diberikan modal tidak lalai terhadap dana yang diberikan serta membantu mengembangkan usahanya agar tetap dapat sesuai prinsip syariah. Salah satu model pendampingan ialah dapat dengan model pendampingan digital marketing yang sangat dibutuhkan terutama pada masa sekarang.

# PENUTUP

Praktik ISE di Indonesia masih menghadapi berbagai tantangan namun juga terdapat peluang yang dapat dijadikan strategi oleh pemangku kepentingan maupun pihak-pihak yang terlibat. Penelitian ini menghasilkan model pengembangan *Islamic social enterprise (ISE)* dari sisi lembaga filantropi yang memiliki modal dari para donatur untuk dimanfaatkan dalam bisnis usaha dengan model bagi hasil serta pelatihan dan pendampingan modal agar sesuai dengan prinsip syariah. Tujuan dari bagi hasil ini ialah untuk memperluas jangkauan manfaat dari ISE sehingga ISE dapat berkembang dan berkelanjutan di Indonesia. Strategi pengembangan *Islamic social enterprise (ISE)* dalam penelitian ini masih secara umum dan belum mencakup seluruh instrumen sumber daya yang ada.

Penelitian selanjutnya disarankan untuk mengkaji kontribusi instrumen *Islamic Social Finance* (ISF) secara rinci dan kuantitatif terhadap potensi pengembangan ISE sehingga dapat memberikan gambaran yang lebih aplikatif bagi pelaku ISE di Indonesia. Penilaian lebih mendalam terhadap pelaksanaan *Islamic Social Enterprise* (ISE), baik secara langsung maupun tidak langsung diperlukan untuk melihat sejauh apa praktik ISE dapat berkembang di Indonesia sehingga nantinya dapat dipraktikan secara masif oleh para pelaksana ISE lainnya dengan tujuan untuk memperluas cakupan manfaat. *Islamic Social Enterprise (ISE)* hadir bukan hanya sekedar memberikan bantuan secara konsumtif tetapi juga mengembangkan dan memberikan edukasi agar para penerima bantuan dapat berkembang dan berdaya sehingga nantinya mereka dapat memperluas praktik ISE di Indonesia.

# DAFTAR PUSTAKA

Adib, M., Muin, A., Abdullah, S., & Bahari, A. (2015). Model on Social Entrepreneurship: Identify The Research Gap Based on Islamic Perspective. *Journal of Holistic Student Development*, *2*(1), 1–11.

Agustha, I. N., & Mawardi, I. (2015). Perbedaan Pembiayaan Model Bagi Hasil dan Non Bagi Hasil Terhadap Profitabilitas dan Resiko (Studi Kasus BMT Amanah Ummah). *Jurnal Ekonomi Syariah Teori Dan Terapan*, 252–264. https://doi.org/10.20473/vol1iss20144pp252-264

Ahmed Shaikh, S., Islam Sultan Sharif Ali, U., Seri Begawan, B., & Hakimi Mohd Shafiai, M. (n.d.). *Application of waqf for social and development finance*. 5–14. https://doi.org/10.1108/IJIF-07-2017-002

Bolwijn, R., Casella, B., & Zhan, J. (2018). International Production and the Digital Economy. In R. van Tulder, A. Verbeke, & L. Piscitello (Eds.), *International Business in the Information and Digital Age* (Vol. 13, pp. 39–64). Emerald Publishing Limited. https://doi.org/10.1108/S1745-886220180000013003

British Council, & UNESCAP. (2018). *Developing an Inclusive and Creative Economy: The State of Social Enterprise in Indonesia*. https://www.britishcouncil.id/en/programmes/society/dice-indonesia/landscape-creative-and-social-enterprises-indonesia

Fauziah, N. N. (2021). Developing Cash Waqf Model as an Alternative Financing for Social Enterprises to Support Decent Work and Economic Growth in Indonesia. *Turkish Journal of Islamic Economics*, *8*(Special Issue), 195–217. <https://doi.org/10.26414/a2759>

Febriyanti, N., & Ihsani, A. F. A. (2020). Cash Waqf Linked Social Entrepreneur. *El-Qist : Journal of Islamic Economics and Business (JIEB)*, 1–21. https://doi.org/10.15642/elqist.2020.10.1.1-21

Fitria, A. (2018). Social Entrepreneurship Dalam Perspektif Maqashid Al-Syariah. *Iqtisad*, *4*(1), 1–17. https://doi.org/10.31942/iq.v4i1.2002

Fuadi, D. S., Akhyadi, A. S., & Saripah, I. (2021). Systematic Review: Strategi Pemberdayaan Pelaku UMKM Menuju Ekonomi Digital Melalui Aksi Sosial. *Diklus: Jurnal Pendidikan Luar Sekolah*, *5*(1), 1–13. https://doi.org/10.21831/diklus.v5i1.37122

Hati, S. R. H., & Idris, A. (2019). The role of leader vs organisational credibility in Islamic social enterprise marketing communication. *Journal of Islamic Marketing*, *10*(4), 1128–1150. https://doi.org/10.1108/JIMA-02-2017-0018

Kamaruddin, M. I. H., & Auzair, S. M. (2019). Conceptualizing Islamic Social Enterprise (ISE) from Islamic Perspective. *International Journal of Management, Accounting & Economics*, *6*(4), 368–381.

Kamaruddin, M. I. H., & Auzair, S. M. (2020). Measuring ‘Islamic accountability’ in Islamic social enterprise (ISE). *International Journal of Islamic and Middle Eastern Finance and Management*, *13*(2), 303–321. https://doi.org/10.1108/IMEFM-04-2018-0134

Kasdi, A. (2016). Filantropi Islam Untuk Pemberdayaan Ekonomi Umat (Model Pemberdayaan ZISWAF di BMT Se-Kabupaten Demak). *Iqtishadia Jurnal Kajian Ekonomi Dan Bisnis Islam*, *9*(2), 227–245. <https://doi.org/10.21043/iqtishadia.v9i2.1729>

Kementerian Sekretariat Negara Republik Indonesia. (2022). Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2022 tentang Pengembangan Kewirausahaan Nasional Tahun 2021 – 2024.

Kusumasari, B. (2016). The Business Model of Social Entrepreneurship in Indonesia. *Bisnis & Birokrasi Journal*, *22*(3), 156–168. https://doi.org/10.20476/jbb.v22i3.6438

Lontoh, N. L., & Oktariani, A. (2021). Setting Up Sustainable Development of Social Enterprises Model in Indonesia. *Proceedings of the Business Innovation and Engineering Conference 2020 (BIEC 2020)*, 105–110. <https://doi.org/10.2991/aebmr.k.210727.019>

Mahfud, M. (2021). Program One Pesantren - One Product in the Perspective of Social Entrepreneurship. *Budapest International Research and Critics Institute  (BIRCI-Journal): Humanities and Social Sciences*, *4*(1), 1207–1212. https://doi.org/10.33258/birci.v4i1.1737

Majid, R.-. (2021). Mudharabah Linked Waqf: Inovasi Model Pembiayaan Berkelanjutan untuk UMKM. *Al-Kharaj : Jurnal Ekonomi, Keuangan & Bisnis Syariah*, *3*(1), 101–118. https://doi.org/10.47467/alkharaj.v3i1.267

Molla, R. I., & Alam, Md. M. (2013). A Third Sector-Led Economic Model. *American Journal of Islamic Social Sciences*, *30*(1), 73–91. https://doi.org/10.35632/ajiss.v30i1.311

Muhammad Iqmal Hisham Kamaruddin, & Sofiah Md Auzair. (2019). Conceptualizing Islamic Social Enterprise (ISE) from Islamic Perspective. *International Journal of Management, Accounting & Economics*, *6*(4), 368–381.

Muhammad, M. M. (2020). Social Entrepreneurship Mewujudkan Kesejahteraan Masyarakat Berdasarkan Prinsip-prinsip Ekonomi Syariah. *El-Iqthisadi : Jurnal Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Dan Hukum*, *2*(2), 68–78. https://doi.org/10.24252/el-iqthisadi.v2i2.18352

Najim Nur Fauziah, & Salina Kassim. (2022). Cash Waqf Model for Social Enterprise to Achieve Sustainable Development Goals in Indonesia. *Al-Muzara’ah*, 95–105. https://doi.org/10.29244/jam.specialissue2022.95-105

Olanrewaju, A. S., Shahbudin, A. S. M., & Zakariyah, H. (2020). A Synthesis of the Islamic Social Finance for Sustainable Islamic Social Enterprise: A Four Factor of Production Frame. *Journal of Critical Reviews*, *7*(9), 6188–6199. https://doi.org/10.31838/jcr.07.19.1104

Reginald, A. R., & Mawardi, I. (2015). Kewirausahaan Sosial Pada Pondok Pesantren Sidogiri Pasuruan. *Jurnal Ekonomi Syariah Teori Dan Terapan*, *1*(5), 333–345. https://doi.org/10.20473/vol1iss20145pp333-345

Safei, A. A. (2021). The formula of Islamic community development in Indonesia through the social entrepreneurship approach. *Religious: Jurnal Studi Agama-Agama Dan Lintas Budaya*, *5*(1), 47–58. https://doi.org/10.15575/rjsalb.v5i1.9685

Salarzehi, H., Armesh, H., & Nikbin, D. (2010). Waqf as a Social Entrepreneurship Model in Islam. *International Journal of Business and Management*, *5*(7), 179–186. https://doi.org/10.5539/ijbm.v5n7p179

Sarif, S. M., Sarwar, A., & Ismail, Y. (2013). Practice of social entrepreneurship among the muslim entrepreneurs in malaysia. *Middle East Journal of Scientific Research*, *14*(11), 1463–1470. https://doi.org/10.5829/idosi.mejsr.2013.14.11.2347

Siahaan, D., Iswati, S., & Zarkasyi, A. F. (2019). Social Enterprise: the Alternatives Financial Support for Educational Institusion. *International Journal of Economics and Financial Issues*, *9*(3), 1–11. https://doi.org/10.32479/ijefi.7626

Suryani, M., & Adawiyah, N. N. (2017). *Cash Waqf Performance in Indonesia: Empirical Analyses on Islamic Social Entrepreneurship Model*. 1–9. http://nida\_n\_adawiyah.staff.gunadarma.ac.id/Publications/files/3813/Cash+Waqf+Performance+In+Indonesia+Empirical+Analyses+on+Islamic+Social+Entrepreneurship+Model.pdf

Taftazani, B. M. (2017). Masalah Sosial Dan Wirausaha Sosial. *Social Work Jurnal*, *7*(1), 1–129. <https://doi.org/10.24198/share.v7i1.13822>

Wulandari, R. (2019). Penerapan Islamic Social Entrepreneurship Bagi Penyandang Disabilitas di Tiara Handicraft Surabaya. *Skripsi.* Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, Surabaya.

Website :

Badan Pusat Statistik RI. (2021). Indikator Tujuan Pembangunan Berkelanjutan Indonesia 2021. Badan Pusat Statistik. <https://www.bps.go.id/publication/2021/12/17/63225cc5ff4204d6e756b047/indikator-tujuan-pembangunan-berkelanjutan-indonesia-2021.html>

Bank Syariah Indonesia. (2021). *Bank Syariah Indonesia Latih Milenial Jadi Sociopreneur.* Diambil dari<https://www.bankbsi.co.id/news-update/berita/bank-syariah-indonesia-latih-milenial-jadi-sociopreneur>

BSMUmat. (2020). Laporan Tahunan 2019. Diambil dari https://www.bsmu.or.id/laporan-tahunan/

Badan Wakaf Indonesia. (2020) Wakaf Uang di Indonesia. Diambil dari [Wakaf Uang di Indonesia | Badan Wakaf Indonesia | BWI.go.id](https://www.bwi.go.id/literasiwakaf/wakaf-uang-di-indonesia/)

Kementerian Keuangan Republik Indonesia. Siaran Pers. (2021). SP-66/KLI/2021. Diambil dari [sp66-peran-keuangan-syariah-dalam-pemulihan-ekonomi-nasional-indonesia.pdf (kemenkeu.go.id)](https://www.kemenkeu.go.id/media/18382/sp66-peran-keuangan-syariah-dalam-pemulihan-ekonomi-nasional-indonesia.pdf)

Laporan Ekonomi & Keuangan Syariah. (2020). Bersinergi Membangun Ekonomi & Keuangan Syariah. Diambil dari <https://www.bi.go.id/id/LEKSI-2020/default.aspx>

MUI, (2000) Fatwa Dewan Syari’ah, Diambil dari [07-Mudharabah (mui.or.id)](http://www.mui.or.id/wp-content/uploads/files/fatwa/07-Mudharabah.pdf)

1. BPS [↑](#footnote-ref-1)
2. Budi Muhammad Taftazani, “Masalah Sosial Dan Wirausaha Sosial,” *Share : Social Work Journal* 7, no. 1 (July 30, 2017): 90, 1-129, https://doi.org/10.24198/share.v7i1.13822. [↑](#footnote-ref-2)
3. Agus Ahmad Safei, “The Formula of Islamic Community Development in Indonesia through the Social Entrepreneurship Approach,” *Religious: Jurnal Studi Agama-Agama Dan Lintas Budaya* 5, no. 1 (2021): 47–58, https://doi.org/10.15575/rjsalb.v5i1.9685. [↑](#footnote-ref-3)
4. Safei. [↑](#footnote-ref-4)
5. Lucky Nugroho et al., “Corporate Culture And Financial Risk Management In Islamic Social Enterprises ( Indonesia Evidence ) Lucky Nugroho Wiwik Utami Hari Setiyawati Abstract Finance Finance and and of Commerce of Commerce International International” 4, no. 2 (2018): 12–24. [↑](#footnote-ref-5)
6. Aminu Sikiru Olanrewaju et al., “A Synthesis of the Islamic Social Finance for Sustainable Islamic Social Enterprise: A Four Factor of Production Frame,” *Journal of Critical Reviews* 7, no. 19 (2020): 6188–99, https://doi.org/10.31838/jcr.07.19.1104. [↑](#footnote-ref-6)
7. Mahmuda Mulia Muhammad, “Social Entrepreneurship Mewujudkan Kesejahteraan Masyarakat Berdasarkan Prinsip-Prinsip Ekonomi Syariah,” *El-Iqthisadi : Jurnal Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Dan Hukum* 2, no. 2 (2020): 68–78, https://doi.org/10.24252/el-iqthisadi.v2i2.18352. [↑](#footnote-ref-7)
8. Sri Rahayu Hijrah Hati and Aida Idris, “The Role of Leader vs Organisational Credibility in Islamic Social Enterprise Marketing Communication,” *Journal of Islamic Marketing* 10, no. 4 (2019): 1128–50, https://doi.org/10.1108/JIMA-02-2017-0018. [↑](#footnote-ref-8)
9. Muhammad Iqmal Hisham Kamaruddin and Sofiah Md Auzair, “Conceptualizing Islamic Social Enterprise (ISE) from Islamic Perspective.,” *International Journal of Management, Accounting & Economics* 6, no. 4 (2019): 368–81. [↑](#footnote-ref-9)
10. Muhammad Iqmal Hisham Kamaruddin and Sofiah Md Auzair. International Journal of Management, Accounting & Economics, 6(4), 368–381. [↑](#footnote-ref-10)
11. Fitria, A. (2018). Social Entrepreneurship Dalam Perspektif Maqashid Al-Syariah. Iqtisad, 4(1), 1–17. <https://doi.org/10.31942/iq.v4i1.2002> [↑](#footnote-ref-11)
12. Fitria, A. (2018). Social Entrepreneurship Dalam Perspektif Maqashid Al-Syariah. Iqtisad, 4(1), 1–17. <https://doi.org/10.31942/iq.v4i1.2002> [↑](#footnote-ref-12)
13. Taftazani, B. M. (2017). Masalah Sosial Dan Wirausaha Sosial. *Social Work Jurnal*, *7*(1), 1–129. <https://doi.org/10.24198/share.v7i1.13822> [↑](#footnote-ref-13)
14. Najim Nur Fauziah, “Developing Cash Waqf Model as an Alternative Financing for Social Enterprises to Support Decent Work and Economic Growth in Indonesia,” *Turkish Journal of Islamic Economics* 8, no. Special Issue (2021): 195–217, https://doi.org/10.26414/a2759. [↑](#footnote-ref-14)
15. Bevaola Kusumasari, “The Business Model of Social Entrepreneurship,” *International Journal of Administrative Science & Organization* 22, no. 3 (2015): 156–68, https://doi.org/10.20476/jbb.v22i3.6438. [↑](#footnote-ref-15)
16. Daniar Siahaan, Sri Iswati, and Amal Fathullah Zarkasyi, “Social Enterprise: The Alternatives Financial Support for Educational Institusion,” *International Journal of Economics and Financial Issues* 9, no. 3 (2019): 1–11, https://doi.org/10.32479/ijefi.7626. [↑](#footnote-ref-16)
17. Mohd Adib Abd Muin, Shuhairimi Abdullah, and Azizan Bahari, “Model on Social Entrepreneurship : Identify the Research Gap Based on Islamic Perspective,” *Journal of Holistic Student Development* 2, no. 1 (2015): 1–11. [↑](#footnote-ref-17)
18. Muhammad Iqmal Hisham Kamaruddin and Sofiah Md Auzair, “Conceptualizing Islamic Social Enterprise (ISE) from Islamic Perspective.” International Journal of Management, Accounting & Economics, 6(4), 368–381. [↑](#footnote-ref-18)
19. Muhammad Iqmal Hisham Kamaruddin and Sofiah Md Auzair, “Conceptualizing Islamic Social Enterprise (ISE) from Islamic Perspective.” International Journal of Management, Accounting & Economics, 6(4), 368–381. [↑](#footnote-ref-19)
20. Muhammad Iqmal Hisham Kamaruddin and Sofiah Md Auzair, “Conceptualizing Islamic Social Enterprise (ISE) from Islamic Perspective.” International Journal of Management, Accounting & Economics, 6(4), 368–381. [↑](#footnote-ref-20)
21. Rifaldi - Majid, “Mudharabah Linked Waqf: Inovasi Model Pembiayaan Berkelanjutan Untuk UMKM,” *Al-Kharaj : Jurnal Ekonomi, Keuangan & Bisnis Syariah* 3, no. 1 (2021): 102–18, https://doi.org/10.47467/alkharaj.v3i1.267. [↑](#footnote-ref-21)
22. Rafiqul Islam Molla and Md. Mahmudul Alam, “A Third Sector-Led Economic Model,” *American Journal of Islamic Social Sciences* 30, no. 1 (2013): 73–91, https://doi.org/10.35632/ajiss.v30i1.311. [↑](#footnote-ref-22)
23. Muhammad Iqmal Hisham Kamaruddin and Sofiah Md Auzair, “Measuring ‘Islamic Accountability’ in Islamic Social Enterprise (ISE),” *International Journal of Islamic and Middle Eastern Finance and Management* 13, no. 2 (2020): 303–21, https://doi.org/10.1108/IMEFM-04-2018-0134. [↑](#footnote-ref-23)
24. Natasya Larasati Lontoh and Andina Oktariani, “Setting Up Sustainable Development of Social Enterprises Model in Indonesia,” in *Proceedings of the Business Innovation and Engineering Conference 2020 (BIEC 2020)*, vol. 184, 2021, 105–10, https://doi.org/10.2991/aebmr.k.210727.019. [↑](#footnote-ref-24)
25. Mohd Adib Abd Muin, Shuhairimi Abdullah, and Azizan Bahari, “Model on Social Entrepreneurship : Identify the Research Gap Based on Islamic Perspective,” Journal of Holistic Student Development 2, no. 1 (2015): 1–11. [↑](#footnote-ref-25)
26. British Council, & UNESCAP. (2018). *Developing an Inclusive and Creative Economy: The State of Social Enterprise in Indonesia*. <https://www.britishcouncil.id/en/programmes/society/dice-indonesia/landscape-creative-and-social-enterprises-indonesia> [↑](#footnote-ref-26)
27. Natasya Larasati Lontoh and Andina Oktariani, “Setting Up Sustainable Development of Social Enterprises Model in Indonesia,” in Proceedings of the Business Innovation and Engineering Conference 2020 (BIEC 2020), vol. 184, 2021, 105–10, https://doi.org/10.2991/aebmr.k.210727.019. [↑](#footnote-ref-27)
28. Sri Rahayu Hijrah Hati and Aida Idris, “The Role of Leader vs Organisational Credibility in Islamic Social Enterprise Marketing Communication,” *Journal of Islamic Marketing* 10, no. 4 (October 21, 2019): 1128–50, https://doi.org/10.1108/JIMA-02-2017-0018. [↑](#footnote-ref-28)
29. Najim Nur Fauziah and Salina Kassim, “Cash Waqf Model for Social Enterprise to Achieve Sustainable Development Goals in Indonesia,” *Al-Muzara’Ah* 2022 (2022): 95–105, https://doi.org/10.29244/jam.specialissue2022.95-105. [↑](#footnote-ref-29)
30. Salman Ahmed Shaikh, Abdul Ghafar Ismail, and Muhammad Hakimi Mohd Shafiai, “Application of Waqf for Social and Development Finance,” *ISRA International Journal of Islamic Finance* 9, no. 1 (2017): 5–14, https://doi.org/10.1108/IJIF-07-2017-002. [↑](#footnote-ref-30)
31. Najim Nur Fauziah and Salina Kassim, “Cash Waqf Model for Social Enterprise to Achieve Sustainable Development Goals in Indonesia,” Al-Muzara’Ah 2022 (2022): 95–105, https://doi.org/10.29244/jam.specialissue2022.95-105. [↑](#footnote-ref-31)
32. Mufid Suryani and Nida Nusaibatul Adawiyah, “Cash Waqf Performance In Indonesia: Empirical Analyses on Islamic Social Entrepreneurship Model,” 2017, 1-9 http://nida\_n\_adawiyah.staff.gunadarma.ac.id/Publications/files/3813/Cash+Waqf+Performance+In+Indonesia+Empirical+Analyses+on+Islamic+Social+Entrepreneurship+Model.pdf.Suryani and Adawiyah. [↑](#footnote-ref-32)
33. Ilham Nur Agustha and Imron Mawardi, “Perbedaan Pembiayaan Model Bagi Hasil Dan Non Bagi Hasil Terhadap Profitabilitas Dan Resiko ( STudi Kasus BMT Amanah Ummah),” *JESTT* 1, no. 2 (2014): 253–64. [↑](#footnote-ref-33)
34. Rifaldi - Majid, “Mudharabah Linked Waqf: Inovasi Model Pembiayaan Berkelanjutan Untuk UMKM,” Al-Kharaj : Jurnal Ekonomi, Keuangan & Bisnis Syariah 3, no. 1 (2021): 102–18, https://doi.org/10.47467/alkharaj.v3i1.267. [↑](#footnote-ref-34)
35. Abdurrohman Kasdi, “Filantropi Islam Untuk Pemberdayaan Ekonomi Umat (Model Pemberdayaan ZISWAF Di BMT Se-Kabupaten Demak),” *IQTISHADIA  227-245* Vol. 9 (2016): 227–45, https://doi.org/10.21043/iqtishadia.v9i2. [↑](#footnote-ref-35)